

ANALISIS PELAKSANAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN REKTOR IKIP PGRI PONTIANAK

Muhammad Anwar Rube'i¹, Rohani²

Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera Nomor 88 Pontianak-78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855

¹e-mail: anwarptk87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila ke-empat pancasila dalam pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif analisis. Subjek penelitian ini adalah senat, Dekan Fakultas, Dosen di Lingkungan IKIP-PGRI Pontianak dan panitia pemilihan Rektor. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila keempat pancasila pada pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik dengan mengadopsi dan menginternalisasikan, dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam wujud sikap dan perilaku yang demokratis berdasarkan pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan berpendapat; adanya sikap saling menghormati, menghargai dan tidak memaksakan kehendak, adanya musyawarah untuk mufakat sebelum voting, dan adanya pemilihan yang adil, bebas, jujur dan transparan.

Kata kunci: Nilai Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Rektor

Abstract

This study aims to describe the implementation of democratic values based on the four precepts of Pancasila in the selection of the Rector of IKIP PGRI Pontianak. The research method used in this research is qualitative research in the form of descriptive analysis research. The subjects of this study were the Senate, the Faculty Dean, Lecturers in the Pontianak IKIP-PGRI Environment and the Chancellor selection committee. Data collection tools in this study are interview guides, observations, documentation. Data analysis techniques using qualitative data analysis. The results showed that the implementation of democratic values based on the four precepts of Pancasila in the election of the Rector of IKIP PGRI Pontianak had gone well by adopting and internalizing, and transforming democratic values into democratic attitudes and behaviors based on Pancasila. This is indicated by the existence of freedom of association, and assembly, and opinion; the existence of mutual respect, respect and not forcing the will, the existence of deliberations to reach consensus before voting, and the existence of fair, free, honest and transparent elections.

Keywords: Democratic Values, Pancasila, Rector Election

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah dimana masyarakatnya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada, dengan melaukukan pengkajian secara ilmiah yang diperoleh dari kebenaran yang terkaji seseuai metode ilmu pengetahuan. Dalam perannya, perguruan tinggi merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional yang mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat. Perguruan tinggi pun mempunyai tiga tugas utama yang dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Dengan suasana ilmiahnya maka kampus juga memerlukan suatu jenis kebebasan. Syarbaini mengatakan bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana diatur dalam PP

nomor 30 tahun 1990 adalah kebebasan akademik yang dimiliki anggota akademik secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.

Salah satu suasana ilmiah pun diperlihatkan setiap perguruan tinggi selama empat tahun sekali, yaitu pemilihan Rektor. Pemilihan Rektor adalah sebuah wujud demokrasi yang didengungkan di lingkungan kampus. Pemilihan rektor juga merupakan wujud kepedulian sivitas akademika untuk memilih pemimpin yang dapat meneruskan cita-cita mereka.

Dalam pasal 29 PP 60/199 menyebutkan bahwa pasal 29, pemimpin perguruan tinggi sebagai penanggung jawab utama pada perguruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma, tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi. Sedangkan dalam pasal 30, disebutkan bahwa senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi bersangkutan.

Kaitannya dengan pemilihan rektor, maka Senat perguruan tinggi memiliki tugas pokok untuk memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/ ketua/direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor (pasal 30 ayat 2 butir g). Kemudian didalam pasal 39 ayat satu disebutkan Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat dan diberhentikan presiden atas usul menteri, menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan. Melihat pada aturan yang dimaksud adalah bahwa rektor diangkat oleh Presiden atas usulan menteri dengan pertimbangan senat universitas yang bersangkutan.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa pemilihan rektor yang ada di perguruan tinggi itu mengacu pada pasal yang telah disebutkan diatas, pemilihan rektor harus selaras dengan Peraturan pemerintah. Yang kedua Pemilihan rektor juga mengusung pemilihan langsung, yaitu memberikan kesempatan kepada sivitas akademik untuk memilih wakil mereka yang akan dikirim ke Senat dengan adanya jaring aspirasi. Jadi pemilihan rektor di perguruan tinggi masih melibatkan sivitas akademiknya untuk menentukan wakil mereka.

Dari pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa pemilihan rektor dalam lingkup perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta tentunya akan berbeda dari segi

pelaksanaan sistem pemilihannya. Pemilihan rektor untuk perguruan tinggi sudah pasti harus mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Sedangkan pemilihan rektor pada perguruan tinggi swasta sudah pasti mengacu pada domain otonomi kebijakan dan aturan kampus itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan rektor pada perguruan tinggi swasta terutama pada kampus IKIP PGRI Pontianak harus sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, dan kerjasama. nilai-nilai demokrasi (Cipto, 2002:31).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai demokrasi sangat penting di pahami dan dipraktikan dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Baik dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun praktik penyelenggaraan dalam lembaga pendidikan kampus. nilai-nilai demokrasi demokrasi wajib diwujudkan dalam sistem pemilihan ketua prodi, dekan fakultas bahkan dalam pemilihan pimpinan institusi lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. menurut Sugiyono (2012:75) menyatakan bahwa studi deskriptif berorientasi pada pemecahan masalah untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya, secara insentif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Melalui penelitian deskriptif ini nantinya akan memberikan gambaran secara mendetail terhadap latar belakang, sifat dan karakter kajian yang khas, kemudian dari keakhasan tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum .

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di IKIP-PGRI Pontianak yang beralamat di jalan Ampera. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah dosen dan senat kampus IKIP PGRI Pontianak. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Proses analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan teknik diskriptif. Pada prinsipnya data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisa data dikekmukakan oleh Miles dan Huberman (1992), mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi Berdasarkan Sila Ke-empat Pancasila Dalam Pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak

Nilai merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Nilai demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sistem pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak tersebut sebagai adalah: (1) adanya kebebasan mengeluarkan pendapat; (3) kebebasan memilih dalam pemilihan pemimpin; (4) memiliki hak menduduki jabatan; (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara pemilih; (6) sistem pemilihan yang bebas dan adil.

Hasil wawancara terkait dengan bentuk nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan rektor IKIP-PGRI Pontianak dengan calon Rektor IKIP-PGRI Pontianak, Bapak Rustam, M.Pd. Kons menyatakan bahwa lembaga mengizinkan untuk membentuk organisasi kampus, karena dengan membentuk organisasi kampus, mahasiswa akan mendapat banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi, yang berbeda latar belakang, budaya, etnis, agama, dan pemikiran. Selain itu kampus juga memberikan keleluasaan biasanya kita mengadakan audiensi sesuai dengan standar operasional organisasi mahasiswa. Selanjutnya lembaga memberi batasan waktu dalam kepemimpinan rektor kampus dengan waktu 4 tahun dalam pemilihan rektor kampus.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sulha, M.Si, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa lembaga mengizinkan karena dengan membentuk organisasi kampus mahasiswa mulai belajar bahwa tekanan membuat mentalnya menjadi lebih kuat dan bijaksana dalam memandang permasalahan yang terjadi di dalam organisasi tersebut dan sangat memberi keleluasaan dalam memperjuangkan hak mahasiswa lewat organisasi karena lewat organisasi mahasiswa lah pihak lembaga mengetahui kekurangan yang belum diberikan kepada organisasi mahasiswa itu apa saja.

Hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu erna octavia, M.Pd menyatakan bahwa pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dikampus bisa diwujudkan dengan kegiatan organisasi guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Semua mahasiswa diberikan kesempatan dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum asalkan sesuai norma dan etika yang berlaku dikampus. Selain itu, ditingkat institusi sudah menjalankan sistem demokrasi yang baik, terutama dalam pemilihan rektor yang dilaksanakan empat tahun sekali. Semua dosen yang memiliki kemampuan, kompeten, masa kerja, dan kualifikasi berhak mengajukan diri sebagai calon Rektor IKIP PGRI Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan rektor IKIP-PGRI Pontianak berjalan dengan baik dapat dilihat dari: a) kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, sudah terjadi dengan baik, hal ini diketahui

berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber yang menyatakan secara umum lembaga mengizinkan untuk membentuk organisasi kampus, karena dengan membentuk organisasi kampus, mahasiswa akan mendapat banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi, yang berbeda latar belakang, budaya, etnis, agama, dan pemikiran, b) pergantian kekuasaan secara berkala, sudah terjadi berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa sumber, Tujuan pemilihan rektor dilakukan 4 tahun sekali jadi lembaga dapat meminimalisasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.c) memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemilihan pemimpin baru, hal ini diketahui dari berbagai narasumber yang menyatakan bahwa semua dosen yang telah memiliki kelayakan dan terpenuhi kelayakan persyaratan, memiliki hak untuk ikut dalam pemilihan rektor baru.

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* dan *kratos/Kratein*, *Demos* berarti rakyat. dan *kratein* berarti kekuasaan/berkuasa" (Budiardjo, 1978:50). Jadi, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Dengan demikian dalam negara demokrasi, pemerintah (penguasa) berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdikan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia ialah demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kartaprawira (2002.1991) menyatakan bahwa: "Praktik-praktik mekanisme demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik Indonesia". Demokrasi Pancasila ini termasuk demokrasi yang konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo (1978:51), bahwa: "Beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup -jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945".

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip demokrasi yang dilaksanakan pada sistem demokrasi dalam pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak berdasarkan pada prinsip demokrasi langsung, prinsip kebebasan dalam menyatakan pendapat dan dalam menentukan pilihan, prinsip kejujuran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak dan prinsip menghargai dan menghormati.

Berdasarkan beberapa prinsip-prinsip demokrasi, terdapat dua prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan rektor IKIP-PGRI Pontianak sebagai adalah: 1) kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan setiap orang untuk berserikat atau membentuk organisasi. 2) pergantian kekuasaan

secara berkala, pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Wujud Pelaksanaan Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak

Wujud pelaksanaan sistem demokrasi berdasarkan sila keempat pada IKIP-PGRI Pontianak adalah terlaksananya demokrasi memungkinkan warga untuk berpartisipasi, secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi termasuk praktek-praktek sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan untuk kebebasan politik secara bebas dan sama-sama. Adapun hasil wawancara terkait dengan wujud pelaksanaan demokrasi di IKIP-PGRI Pontianak dengan calon Rektor IKIP-PGRI Pontianak, Bapak Rustam, M.Pd. Kons menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan rektor berjalan dengan jujur dan adil karena dilakukan dengan pemungutan suara melalui anggota senat dan dilaksanakan layaknya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan rektor sudah transparan hal ini dapat dilihat setelah selesai pemungutan suara kita langsung menghitungnya. Pemilihan sudah memberikan kesempatan mencalonkan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam STATUTA kemudian panitia membentuk penjangkaran dan kita diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi setelah kita lolos di penjangkaran, menurut saya itu sudah berjalan sesuai harapan. Semua yang mencalonkan diri semua adalah yang terbaik, dan kebetulan saya sebagai pribadi terpilih menjadi Rektor.

Sajian data dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sulha, M.Si, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan rektor berjalan dengan jujur dan adil karena ini juga untuk kemajuan kampus, kompetisi rektor juga mempengaruhi kualitas kampus dan tidak ada, walaupun ada oknum yang ingin mempengaruhi proses pemilihan. Selanjutnya pemilihan sudah transparan, kita sudah membuat pengumuman mulai dari visi misi calon rektor dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Suherdiyanto, S.Pd. M.Pd, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa Pelaksanaan pemilihan rektor sangat transparan karena jadwal sudah kita tempel di mading dan waktu pemilihan ada perwakilan mahasiswa yang ikut menyaksikan berjalan nya pemilihan sampai penghitungan suara. Dari segi proses sudah sesuai dengan harapan, semua orang bisa jadi rektor tapi tidak semua orang bisa mengimplementasikan jika beliau jadi rektor beliau juga harus jadi pemimpin.

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Pujo Sukino M.Pd, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa proses pemilihan rektor sudah transparan karena kerangka pelaksanaan sudah kita umumkan di masing-masing kampus. Selaku

panitia sudah berjalan sesuai dengan harapan, berjalan dengan tepat waktu dan jujur dan adil. Hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu erna octavia, M.Pd menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan rektor IKIP PGRI Pontianak sudah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan secara terbuka, jujur, adil, transparan, dan sangat demokratis. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wujud pelaksanaan demokrasi di IKIP-PGRI Pontianak berjalannya baik dapat dilihat dari: a) jujur dan adil, secara umum pelaksanaan pemilihan rektor berjalan dengan jujur dan adil karena dilakukan dengan pemungutan suara melalui anggota senat dan dilaksanakan layaknya pemilihan umum, b) transparan secara umum pemilihan sudah transparan, kita sudah membuat pengumuman mulai dari visi misi calon rektor dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut c) menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas, maka peneliti simpulkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi berjalan dengan baik dan dan menjunjung tinggi sistem demokrasi yang ada. Nilai-nilai demokrasi yang dijalankan yaitu prinsip demokratis, kebebasan dan menjunjung tinggi hak dan kesetaraan, memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran, serta bersifat terbuka dan menjunjung tinggi peraturan yang telah dibuat oleh panitia pemilihan.

Wujud pelaksanaan demokrasi di IKIP-PGRI Pontianak adalah terlaksananya demokrasi memungkinkan warga untuk berpartisipasi, secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi termasuk praktek-praktek sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan untuk kebebasan politik secara bebas dan sama-sama. Pemilihan dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga Praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan. Pemilu merupakan salah satu ciri dari bentuk sebuah demokrasi. Budiyanto, (2007:37) mengemukakan model-model demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, demokrasi konstitusional, demokrasi langsung. Fuadi (2010:34) mengemukakan bahwa demokrasi jika dilihat dari segi bagaimana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wujud pelaksanaan demokrasi di IKIP-PGRI Pontianak berjalan dengan baik dapat dilihat dari: a) jujur dan adil, secara umum pelaksanaan

pemilihan rektor berjalan dengan jujur dan adil karena dilakukan dengan pemungutan suara melalui anggota senat dan dilaksanakan layaknya pemilihan umum, b) transparan secara umum pemilihan sudah transparan, kita sudah membuat pengumuman mulai dari visi misi calon rektor dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut c) menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan, secara umum dari hasil wawancara sesuai harapan, dilihat dari jadwal dan mekanisme yang sudah di atur lewat senat selain itu kriteria pemimpin juga sudah diatur berdasarkan STATUTA IKIP-PGRI Pontianak. Secara umum wujud pelaksanaan demokrasi di IKIP-PGRI adalah demokrasi perwakilan. Perwakilan yang dimaksud adalah tidak semua dosen mempunyai hak pilih, adapun yang memiliki hak memilih adalah anggota senat yang memilih, yayasan dari PGRI, unsur pimpinan dari kelembagaan yang ada di IKIP-PGRI Pontianak.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Berdasarkan sila ke-4 Pancasila dalam Pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak

Hasil wawancara terkait dengan faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan rektor IKIP-PGRI Pontianak dengan calon Rektor IKIP-PGRI Pontianak Bapak Rustam, M.Pd. Kons menyatakan bahwa Asas keterbukaan, anggota senat yang memilih, yayasan dari PGRI, unsur pimpinan dari kelembagaan dan kita juga mengundang perwakilan organisasi mahasiswa. Pemilihan hanya di ikuti anggota senat, pihak yayasan dan unsur kepemimpinan kelembagaan. semua anggota masing-masing pemilih memiliki persamaan yang sama yaitu sama-sama memilih calon rektor yang mereka inginkan. Kebebasan menjadi landasan dalam pemilihan rektor, karena anggota senat, yayasan dari PGRI dan unsur-unsur kepemimpinan memilih sesuai yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari manapun.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sulha, M.Si, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan rektor dilakukan dengan asas keterbukaan karena semuanya kita sampaikan lewat rapat maupun dalam pemilihan dan diikuti oleh anggota senat, ada mekanisme pemilihan jadi tidak semua dosen ikut dalam pemilihan. Semua pemilih memiliki persamaan dan kesetaraan tidak ada yang kita beda-bedakan dalam pemilihan rektor. Kebebasan menjadi landasan dalam pemilihan rektor dengan mengikuti STATUTA IKIP-PGRI Pontianak. Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Suherdiyanto, S.Pd. M.Pd, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa pemilihan terjadi dengan asas keterbukaan karena pemilihan langsung, memakai kertas suara, ada bilik pencoblosan dan selesai mencoblos langsung di lakukan penghitungan suara. Pemilihan dilakukan oleh anggota senat, unsur kepemimpinan jadi tidak semua sedangkan yayasan IKIP-PGRI hanya mengesahkan saja. Masing-masing kita memiliki persamaan dan kesetaraan yang sama. Senada dengan hasil

wawancara dengan Bapak Hartono, M.Pd, selaku panitia pemilihan Rektor IKIP-PGRI Pontianak menyatakan bahwa pemilihan terjadi atas dasar keterbukaan semua kegiatan dilakukan di aula rektorat yang dihadiri para senat dan wakil dari organisasi mahasiswa di kampus ini dan dalam pemilihan yang mempunyai hak pilih adalah hanya anggota senat saja yang memilih. Dalam pemilihan semuanya memiliki persamaan dan kesetaraan yaitu sama-sama mempunyai hak memilih rektor dan semua pemilih bebas memilih calon rektor yang mereka inginkan tanpa ada paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon rektor, ketua senat, sekretaris senat dan dosen IKIP-PGRI Pontianak terkait dengan faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan rektor IKIP-PGRI Pontianak dapat di kondisikan dengan baik dapat dilihat dari: a) pelaksanaan pemilihan rektor dilakukan dengan dasar keterbukaan karena semuanya kita sampaikan lewat rapat maupun dalam pemilihan dan diikuti oleh anggota senat, b) ada mekanisme pemilihan jadi tidak semua dosen ikut dalam pemilihan. c) semua pemilih memiliki persamaan dan kesetaraan tidak ada yang kita beda-bedakan dalam pemilihan rektor. d) Kebebasan menjadi landasan dalam pemilihan rektor dengan mengikuti STATUTA IKIP-PGRI Pontianak.

Dalam penelitian ini, dengan mendasarkan telaah/kajian teoritik tentang demokrasi, Anis Ibrahim (2012) mengemukakan prinsip dasar demokrasi itu paling tidak ada lima prinsip yang meliputi meliputi: (a) prinsip keterbukaan, (b) prinsip partisipasi publik, (c) prinsip persamaan/kesetaraan, (d) prinsip kebebasan, (e) prinsip kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite. Selanjutnya Anis Ibrahim (2012) mengemukakan fakta empirik (data primer) yang diperoleh di lokasi penelitian maupun fakta normatif (data skunder) dapat diketengahkan bahwa paling tidak ada 5 (lima) faktor yang menghambat prinsip dasar demokrasi di lokasi penelitian yaitu: a. faktor substansi hukum, b. faktor struktur hukum, c. faktor kultur hukum, d. faktor waktu, dan e. faktor anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila keempat pancasila pada pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa sistem demokrasi dalam pemilihan pimpinan baru dilingkungan kampus sudah mengadopsi dan menginternalisasikan, dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam wujud sikap dan perilaku yang demokratis berdasarkan pancasila. kesimpulan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) pelaksanaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila ke-empat pancasila dalam

pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik, serta sudah sesuai nilai-nilai Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebebasan berserikat, dan berkumpul, dan berpendapat; adanya sikap saling menghormati, menghargai dan tidak memaksakan kehendak, adanya musyawarah untuk mufakat sebelum voting, dan adanya pemilihan yang adil, bebas, jujur dan transparan.

Wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila ke-empat Pancasila dalam pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak sebagai berikut a) pemilihan jujur dan adil, pelaksanaan pemilihan rektor berjalan dengan jujur dan adil karena dilakukan dengan pemungutan suara melalui anggota senat dan dilaksanakan layaknya pemilihan umum; b) pemilihan secara transparan, dengan cara menyampaikan pengumuman mulai dari visi misi calon rektor dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut c) menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan, hasil yang diperoleh dari sistem demokrasi yang baik dan sehat, menghasilkan pemimpin baru yang amanah, adil, kompeten, dan bertanggungjawab; d) sikap saling menghargai dan menghormati, dimana perbedaan pendapat, visi, misi dan program kerja serta kalah dalam pemilihan tetap dijunjung tinggi sportifitas, dan melaksanakan keputusan dan hasil dengan penuh ikhlas, tulus dan bertanggungjawab.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai demokrasi berdasarkan sila keempat dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris Program studi di IKIP-PGRI Pontianak sebagai berikut; faktor kesadaran politik, faktor kepemimpinan institusi yang profesional dan kompeten, faktor situasi dan kondisi kultur akademik kampus, faktor

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (1978). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak
- Cipto. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. LP3 UMY
Yogyakarta
- Fuady, Munir (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ibrahim, A. (2012). *Pelebagaan Prinsip Dasar Demokrasi dalam Legislasi Peraturan Daerah di Jawa Timur*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 19 JULI 2012: 363 – 381.
<https://media.neliti.com/media/publications/87156-ID-pelebagaan-prinsip-dasar-demokrasi-dala.pdf>
- Kantaprawira, R. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Meleong, L. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rodaskarya

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kuantitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press